



## Evaluasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Surabaya: Analisis Implementasi dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Pemuda

Assyifa Syanna Zhafira Dinar Putri<sup>1</sup>, Emmanuel Jessica Priskila<sup>2</sup>, Arshafa Rayya Maulidya<sup>3</sup>, Cahyo Bagus Alfian<sup>4</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [24040674172@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674172@mhs.unesa.ac.id), [24040674178@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674178@mhs.unesa.ac.id),  
[24040674179@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674179@mhs.unesa.ac.id), [24040674211@mhs.unesa.ac.id](mailto:24040674211@mhs.unesa.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate the implementation of the Resilient Youth Scholarship Program in Surabaya as an effort to improve access to higher education for students from low-income families while empowering youth through social community activities. The results show that the program has been running quite well, with an increase in the number of recipients and budget allocation, and that it meets most of the policy evaluation indicators according to William Dunn, particularly effectiveness and equity. However, there are still weaknesses in the aspects of efficiency, adequacy of benefits, responsiveness, and policy accuracy that have not yet been fully optimized. This study confirms that the program has generally achieved its primary objectives but requires improvements in its implementation mechanisms to ensure benefits are more equitable, sustainable, and capable of strengthening the role of youth as agents of change. The recommendations include adjusting the assistance scheme, improving the accuracy of distribution, enhancing efficiency through digital systems, structured monitoring and evaluation, non-financial support in the form of training and mentoring, and a feedback mechanism from beneficiaries. Thus, this study provides practical contributions to local governments in optimizing education policies while strengthening youth empowerment at the local level.*

**Keywords:** Youth Resilient Scholarship Program, Policy Evaluation, Higher Education Access, Youth Empowerment, Effectiveness, Policy Implementation.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sekaligus pemberdayaan pemuda melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dengan peningkatan jumlah penerima dan alokasi anggaran, serta memenuhi sebagian besar indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn, khususnya efektivitas dan pemerataan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi, kecukupan manfaat, responsivitas, dan ketepatan kebijakan yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa program telah mencapai tujuan utamanya secara umum, tetapi memerlukan penyempurnaan dalam mekanisme implementasi agar manfaat lebih merata, berkelanjutan, dan mampu memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyesuaian skema bantuan, peningkatan ketepatan penyaluran, penguatan efisiensi melalui sistem digital, pengawasan dan evaluasi*

---

*terstruktur, dukungan non-finansial berupa pelatihan dan pendampingan, serta mekanisme umpan balik dari penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan pendidikan sekaligus memperkuat pemberdayaan pemuda di tingkat lokal.*

**Kata Kunci:** *Program Beasiswa Pemuda Tangguh, Evaluasi Kebijakan, Akses Pendidikan Tinggi, Pemberdayaan Pemuda, Efektivitas, Implementasi Kebijakan.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis yang menegaskan keseriusan pemerintah dalam merespons dinamika sosial sekaligus menetapkan arah pembangunan. Lebih dari sekadar produk hukum, kebijakan publik adalah perangkat operasional yang memiliki implikasi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan, tetapi terutama pada efektivitas implementasi di lapangan. Seperti ditegaskan Van Meter dan Van Horn dalam Situmorang (2016), implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kualitas implementasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan kebijakan.

Dalam ranah pendidikan daerah, Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya hadir sebagai kebijakan publik yang bertujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa, khususnya dari keluarga kurang mampu. Program ini sebelumnya diatur melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022, namun seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan upaya perluasan cakupan program, regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme seleksi, persyaratan penerima, hingga penyaluran bantuan. Selain memberikan dukungan finansial berupa biaya pendidikan dan uang saku, kebijakan ini juga mengandung dimensi pemberdayaan pemuda melalui kewajiban penerima beasiswa menjadi mentor belajar bagi anak-anak sekolah dasar di wilayah domisili mereka. Skema tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat distributif, tetapi juga partisipatif, menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan.

Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari proses implementasi semata, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi langkah penting untuk menilai kinerja program secara menyeluruh. William Dunn (2003) menawarkan enam kriteria evaluasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan menggunakan kerangka evaluasi Dunn serta pendekatan evaluasi formal, penelitian terhadap Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Surabaya diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, sekaligus mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga

---

menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana efektivitas implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa, jika ditinjau melalui kerangka evaluasi formal kebijakan publik? (2) Sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pemberdayaan pemuda melalui keterlibatan aktif penerima beasiswa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apabila dianalisis menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan)?

Evaluasi terhadap Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya dilakukan dengan tujuan: (1) Menilai efektivitas implementasi kebijakan secara formal, yaitu sejauh mana program beasiswa telah memenuhi target resmi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025, meliputi mekanisme seleksi, penyaluran bantuan, serta keterlibatan penerima dalam kegiatan sosial. (2) Menganalisis kinerja program berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), guna mengetahui kontribusi nyata kebijakan terhadap peningkatan akses pendidikan sekaligus pemberdayaan pemuda di tingkat daerah.

Evaluasi terhadap Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya dibatasi pada aspek-aspek berikut: (1) Aspek Implementasi Formal, menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 dan meliputi mekanisme seleksi, persyaratan penerima, penyaluran bantuan pendidikan, serta kewajiban penerima beasiswa sebagai mentor belajar. (2) Aspek Substansi Kebijakan, menggunakan enam kriteria evaluasi menurut William Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, ketepatan, pemerataan, kecukupan, dan responsivitas serta fokus pada dampak program terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta kontribusinya terhadap pemberdayaan pemuda di tingkat daerah. (3) Batasan Wilayah dan Sasaran, Evaluasi pelaksanaan program di wilayah Kota Surabaya dan sasaran evaluasi adalah mahasiswa penerima beasiswa serta aktivitas pemberdayaan yang mereka lakukan di lingkungan masyarakat.

## METODE

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan suatu kebijakan publik. Dalam kajian evaluasi kebijakan, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan, salah satunya adalah evaluasi formal. Evaluasi formal

---

merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Evaluasi ini berfokus pada penilaian sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi formal menekankan pada penggunaan indikator yang terukur dan sistematis, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam konteks kebijakan pemerintah karena memungkinkan adanya perbandingan antara tujuan kebijakan dengan hasil implementasinya. Selain itu, evaluasi formal juga membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan evaluasi formal digunakan untuk menilai implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji proses pelaksanaan program, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan dan mendorong pemberdayaan pemuda.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan, diperlukan kriteria yang jelas dan terukur agar penilaian terhadap suatu kebijakan dapat dilakukan secara komprehensif. Kerangka evaluasi yang akan peneliti gunakan ialah menggunakan kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William Dunn. William Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui enam kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. (1) Efektivitas, Kriteria ini berkaitan dengan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Kriteria ini menilai hubungan antara hasil yang dicapai dengan tujuan kebijakan, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai sasaran yang diinginkan. (2) Efisiensi, Kriteria ini berkaitan dengan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kriteria ini menilai apakah kebijakan dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam proses implementasinya. (3) Kecukupan (adequacy), Kriteria ini berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kriteria ini tidak hanya melihat pencapaian tujuan, tetapi juga tingkat kemampuan kebijakan dalam memberikan solusi yang memadai terhadap masalah yang dihadapi. (4) Pemerataan (equity) Kriteria ini berkaitan dengan apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Kriteria ini menilai apakah kebijakan telah memberikan manfaat secara adil dan merata kepada seluruh kelompok yang menjadi target kebijakan. (5) Responsivitas (responsiveness), Kriteria ini berkaitan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini menilai kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. (6) Ketepatan

(appropriateness), Kriteria ini berkaitan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar benar berguna atau bernilai. Kriteria ini merujuk pada kesesuaian kebijakan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi, serta relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Adapun sumber data yang digunakan meliputi dokumen resmi seperti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025, laporan pelaksanaan program, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan Program Beasiswa Pemuda Tangguh. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan evaluasi kebijakan publik sebagai landasan teoritis dan bahan analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan, seperti regulasi, laporan program, dan data pendukung lainnya. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis sekaligus memperkuat analisis terhadap implementasi kebijakan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono. Model ini memandang analisis data sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus dan interaktif sejak tahap awal hingga akhir penelitian. Tahapan analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dianalisis diinterpretasikan secara mendalam dan disusun dalam bentuk uraian naratif guna menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka evaluasi kebijakan menurut William Dunn, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh bersifat konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Penelitian*

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen strategis yang merepresentasikan keseriusan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah tidak hanya menetapkan arah pembangunan, tetapi juga mengartikulasikan bentuk intervensi nyata guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak

dapat dipahami sebatas sebagai produk normatif, melainkan sebagai perangkat operasional yang memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pada tataran yang lebih operasional, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasinya. Implementasi menjadi jembatan yang menghubungkan antara formulasi kebijakan dengan realisasi di lapangan. Dalam hal ini, Van Meter dan Van Horn dalam Situmorang (2016) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dengan demikian, kualitas implementasi menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan di tingkat daerah, Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan studi bagi mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini pada awalnya didasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian beasiswa. Namun, seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan upaya perluasan cakupan program, regulasi tersebut kemudian diperbarui melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan konkret dalam bentuk pembiayaan pendidikan, seperti bantuan biaya pendidikan, uang saku, serta fasilitas penunjang lainnya guna meringankan beban ekonomi penerima manfaat. Perubahan regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, yang ditandai dengan adanya perluasan penerima beasiswa dari yang sebelumnya terbatas pada mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi mencakup mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). Di sisi lain, perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian besaran bantuan, seperti penurunan uang saku bulanan serta pembatasan bantuan biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara perluasan jangkauan penerima manfaat dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan studi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi pemberdayaan pemuda melalui keterlibatan aktif penerima beasiswa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk berperan sebagai mentor belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar di wilayah kecamatan sesuai domisili administratif. Skema ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak semata-mata bersifat distributif, tetapi juga mengandung pendekatan partisipatif yang menempatkan pemuda sebagai subjek pembangunan.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses implementasinya, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi kebijakan yang sistematis untuk menilai kinerja program secara menyeluruh. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang

---

paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Evaluasi kebijakan berfungsi sebagai instrumen analitis untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan, efektivitas pelaksanaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Edward III (1980), dimana Ia mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk membandingkan tujuan program dengan hasilnya, termasuk mengukur dampak program. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya berorientasi pada hasil akhir (outcome), tetapi juga mencakup proses pelaksanaan (process) serta relevansi kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan evaluasi formal digunakan untuk menilai implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Surabaya. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target kebijakan, seperti peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan pemuda, dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap program tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaan, tetapi juga pada kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan indikator yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Dengan demikian, evaluasi formal memungkinkan identifikasi terhadap kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, termasuk berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan secara optimal serta dampaknya terhadap pemberdayaan pemuda, penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### *Efektivitas*

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Beasiswa Pemuda Tangguh, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses pendidikan serta mendukung keberlanjutan studi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Kota Surabaya. Berdasarkan studi literatur, program ini menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penerima beasiswa yang sangat pesat, dari sekitar 3.186 penerima pada tahun 2024 menjadi 3.502 penerima pada tahun 2025, dan meningkat drastis hingga lebih dari 23.000 penerima pada tahun 2026. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan kenaikan anggaran yang mencapai sekitar Rp190 miliar. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan secara lebih luas. Dari perspektif pemberdayaan pemuda, peningkatan jumlah penerima juga berarti semakin banyak mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri, baik dalam aspek akademik maupun sosial. Keterlibatan penerima beasiswa dalam kegiatan mentoring di masyarakat menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan finansial, tetapi juga pada penguatan peran pemuda sebagai agen perubahan. Namun demikian, efektivitas program

belum sepenuhnya optimal. Perubahan skema bantuan serta kendala dalam penyaluran dana menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam menjamin keberlanjutan studi mahasiswa secara konsisten. Hal ini juga berimplikasi pada pemberdayaan pemuda, karena keterbatasan dukungan dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mengoptimalkan peran sosialnya. Dengan demikian, meskipun tujuan kebijakan telah tercapai secara umum, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan secara maksimal.

### *Efisiensi*

Efisiensi berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh, efisiensi dapat dilihat dari pengelolaan anggaran serta mekanisme pelaksanaan program yang terus mengalami penyesuaian. Peningkatan anggaran hingga mencapai sekitar Rp190 miliar menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengelola sumber daya secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan sistem digital dalam proses pendaftaran serta pemanfaatan basis data desil dalam penentuan penerima menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam aspek administrasi dan penyaluran bantuan. Dari perspektif pemberdayaan pemuda, efisiensi dalam pengelolaan program juga berdampak pada optimalisasi manfaat yang diterima oleh mahasiswa. Semakin efisien proses administrasi dan distribusi bantuan, maka semakin besar peluang bagi mahasiswa untuk fokus pada pengembangan diri dan kontribusi sosial tanpa terbebani oleh kendala administratif. Namun demikian, efisiensi program masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait dengan penyaluran bantuan yang belum sepenuhnya berjalan tepat waktu. Kondisi ini dapat menghambat pemanfaatan bantuan secara optimal, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi efektivitas pemberdayaan pemuda. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi tidak hanya penting dalam aspek administratif, tetapi juga dalam mendukung peran aktif pemuda sebagai penerima manfaat.

### *Kecukupan*

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Program Beasiswa Pemuda Tangguh memberikan bantuan berupa uang saku, bantuan biaya pendidikan (UKT), serta dukungan pembiayaan hingga batas semester tertentu. Berdasarkan studi literatur, bantuan yang diberikan telah mampu membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa. Namun demikian, tingkat kecukupan bantuan masih belum sepenuhnya optimal. Penyesuaian skema bantuan menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan penerima, terutama dalam mencakup biaya hidup dan biaya pendidikan secara menyeluruh. Dari perspektif pemberdayaan pemuda, kecukupan bantuan menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Bantuan yang belum sepenuhnya mencukupi dapat menyebabkan mahasiswa masih menghadapi tekanan ekonomi, sehingga fokus terhadap

---

pengembangan akademik maupun kegiatan sosial menjadi terbatas. Dengan demikian, meskipun program telah memberikan manfaat nyata, tingkat kecukupan bantuan masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya mendukung akses pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas pemuda dalam berperan aktif di masyarakat.

### ***Pemerataan (Equity)***

Kriteria Evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat dan beban dari suatu kebijakan didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran. Implementasi Beasiswa Pemuda Tangguh saat ini menunjukkan adanya penguatan prinsip pemerataan dalam desain program. Pernyataan ini didukung dengan adanya perubahan regulasi dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 135 Tahun 2022 menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas pemerataan akses terhadap program Beasiswa Pemuda Tangguh. Hal ini tercermin dari diperluasnya cakupan penerima beasiswa yang tidak lagi terbatas pada mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN), tetapi juga mencakup mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS). Kebijakan ini secara substantif meningkatkan jangkauan penerima manfaat dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang institusi pendidikan.

Namun demikian, perluasan tersebut diikuti oleh penyesuaian besaran bantuan, yaitu penurunan uang saku bulanan serta pembatasan bantuan biaya pendidikan maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan yang dicapai lebih bersifat kuantitatif (peningkatan jumlah penerima) dibandingkan kualitatif (kedalaman manfaat yang diterima). Dengan kata lain, terjadi pergeseran orientasi dari pemerataan manfaat yang intensif menuju pemerataan akses yang lebih luas.

Dari perspektif pemberdayaan pemuda, kebijakan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi mahasiswa untuk terlibat sebagai agen perubahan melalui kegiatan mentoring di masyarakat. Namun, keterbatasan dukungan finansial berpotensi mempengaruhi kapasitas sebagian mahasiswa dalam menjalankan peran tersebut secara optimal, sehingga dampak pemberdayaan yang dihasilkan dapat menjadi tidak merata.

### ***Responsivitas (Responsiveness)***

Perubahan kebijakan melalui Perwali Nomor 45 Tahun 2025 juga mencerminkan adanya respons pemerintah daerah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai jenis perguruan tinggi. Dengan memasukkan mahasiswa PTS sebagai penerima, kebijakan ini menunjukkan upaya untuk mengakomodasi kelompok yang sebelumnya belum sepenuhnya terjangkau oleh program.

Namun demikian, respons kebijakan ini tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas dukungan finansial. Penyesuaian nominal bantuan justru menunjukkan adanya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mahasiswa secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang memiliki biaya pendidikan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa responsivitas kebijakan lebih

kuat pada aspek perluasan akses dibandingkan pada pemenuhan kebutuhan individual penerima manfaat.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan pemuda, responsivitas program tetap terlihat dari keberlanjutan skema keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan mentoring. Mahasiswa tetap didorong untuk berperan aktif dalam masyarakat, namun kondisi ekonomi yang lebih terbatas dapat mempengaruhi intensitas dan kualitas partisipasi mereka. Dengan demikian, responsivitas kebijakan ini bersifat adaptif, tetapi belum sepenuhnya optimal.

### *Ketepatan (Appropriateness)*

Dari aspek ketepatan, perubahan kebijakan melalui Perwali Nomor 45 Tahun 2025 dapat dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan inklusivitas program. Perluasan penerima ke mahasiswa PTN dan PTS menunjukkan bahwa kebijakan ini berupaya menjawab permasalahan akses pendidikan secara lebih komprehensif, sekaligus memperluas potensi keterlibatan pemuda dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, ketepatan kebijakan ini juga perlu dianalisis dari keseimbangan antara perluasan jangkauan dan kecukupan dukungan yang diberikan. Penurunan besaran bantuan serta pembatasan biaya pendidikan berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meringankan beban ekonomi mahasiswa. Dalam beberapa kasus, kebijakan ini dapat menyebabkan mahasiswa masih menghadapi kendala finansial yang signifikan, sehingga manfaat program tidak sepenuhnya optimal.

Dari perspektif pemberdayaan pemuda, kebijakan ini tetap relevan karena mempertahankan skema partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial. Namun, ketepatan kebijakan akan lebih optimal apabila terdapat keseimbangan antara jumlah penerima dan kualitas dukungan yang diberikan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya tepat dalam memperluas akses, tetapi juga efektif dalam memastikan keberlanjutan peran pemuda sebagai agen perubahan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya telah berjalan dengan cukup baik, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penerima serta alokasi anggaran yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Namun demikian, berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal efisiensi pelaksanaan, kecukupan bantuan, serta keseimbangan antara perluasan jangkauan penerima dan kualitas manfaat yang diberikan. Beberapa kendala seperti perubahan skema bantuan dan keterlambatan penyaluran dana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Dari perspektif pemberdayaan pemuda, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat. Meskipun demikian, keterbatasan dukungan yang ada masih berpotensi mempengaruhi optimalisasi peran tersebut.

Dengan demikian, Program Beasiswa Pemuda Tangguh dapat dikatakan telah menunjukkan capaian yang signifikan, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek implementasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya telah berjalan cukup baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Peningkatan jumlah penerima dan alokasi anggaran mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan program sekaligus mendorong pemberdayaan pemuda melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn, hasil implementasi menunjukkan bahwa program telah memenuhi beberapa kriteria, terutama efektivitas dalam meningkatkan akses pendidikan serta pemerataan dalam memperluas jangkauan penerima. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi pada beberapa aspek, khususnya efisiensi yang belum optimal akibat kendala penyaluran bantuan, kecukupan manfaat yang masih terbatas, serta responsivitas dan ketepatan kebijakan yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan penerima secara menyeluruh. Dengan demikian, Program Beasiswa Pemuda Tangguh dapat dikatakan telah mencapai tujuan utamanya secara umum, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek implementasi agar manfaat yang diberikan dapat lebih optimal, merata, dan berkelanjutan, serta mampu memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan di masyarakat. Dari aspek pemberdayaan pemuda, program ini telah memberikan dampak positif dengan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial sebagai mentor di masyarakat. Namun, keterbatasan dukungan finansial dan kendala implementasi masih mempengaruhi optimalisasi peran tersebut, sehingga dampak pemberdayaan yang dihasilkan belum sepenuhnya maksimal. Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh adalah sebagai berikut: (1) Penyesuaian skema dan kecukupan bantuan Pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian skema bantuan secara lebih proporsional, misalnya, melalui penerapan diferensiasi berdasarkan kondisi ekonomi dan besaran biaya pendidikan masing-masing penerima. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perluasan jumlah penerima tidak mengurangi tingkat kecukupan manfaat, sehingga tujuan utama kebijakan dalam meringankan beban ekonomi mahasiswa tetap tercapai secara optimal. (2) Peningkatan ketepatan dan kelancaran penyaluran bantuan, Perlu adanya penguatan sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat waktu dan konsisten, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan studi mahasiswa serta mendukung pemanfaatan bantuan secara optimal. (3) Penguatan efisiensi pelaksanaan program, Efisiensi program perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sistem digital, pemanfaatan data yang akurat, serta peningkatan koordinasi antarinstitusi guna meminimalkan kendala

administratif dalam pelaksanaan kebijakan. (4) Penguatan pengawasan dan evaluasi program, Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur, khususnya dalam kegiatan mentoring yang dilakukan oleh mahasiswa. Standarisasi pelaksanaan, penyusunan indikator kinerja, serta monitoring berkala penting dilakukan agar kualitas implementasi lebih merata dan terukur. (5) Pengembangan dukungan non-finansial dan pemberdayaan pemuda, Pemerintah daerah perlu meningkatkan dukungan non-finansial, seperti pelatihan kapasitas, pembekalan metode pembelajaran, serta pendampingan kegiatan mentoring. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan, sehingga pemberdayaan pemuda tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berdampak nyata. (6) Peningkatan responsivitas melalui mekanisme umpan balik, Dalam rangka meningkatkan responsivitas kebijakan, pemerintah daerah perlu membuka ruang umpan balik (feedback mechanism) dari penerima manfaat dan masyarakat. Partisipasi aktif ini penting untuk mengidentifikasi kebutuhan riil di lapangan serta mendukung penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif dan tepat sasaran.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wilda Sumarsyah, M.A.P. dan Bapak Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing dari Universitas Negeri Surabaya atas arahan dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya atas ketersediaan informasi dan dokumen penelitian, serta kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para peneliti terdahulu dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- William N. Dunn. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Education.
- Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/344289/perwali-kota-surabaya-no-4-tahun-2026>
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/344289/perwali-kota-surabaya-no-4-tahun-2026>
- William N. Dunn-Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (n.d.). Gadjah Mada University Press. <https://www.scribd.com/document/462267499/William-N-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003-pdf>

- 
- Zakirin, M., & Arifin, J. (n.d.). Evaluasi Kebijakan dilihat dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.
- Andini, D., Widodo, D., & Radjikan. (2023, Maret). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 2.
- Dwi A, M., & Isbandono, P. (2024). Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya, Inovant Volume 2, Nomor 2, Halaman 16 - 27.
- Desvita, T. A., Meilisa Mufarocho, M., Ivanda, A. A., Prabawati, I., & Suprpto, F. A. (2026, April). Evaluasi Kebijakan Bantuan Dana Pendidikan: Studi Kasus Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 3, Issue 9.
- Firdaus, D. A. P., & Widiyarta, A. (2024, November-January). Implementasi Kebijakan Beasiswa Pemuda Tangguh dalam Mendorong Peningkatan Kualitas Pendidikan. Journal Publicuho, Volume 7 No 4.
- Novyana, D. (2025). Evaluasi Sistem Administrasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Jurnal Administrasi Kantor, 130-142.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2026). Pendaftaran Beasiswa Pemuda Tangguh Tahun 2026. Diakses dari: <https://besmart.surabaya.go.id>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025). Perluasan Program Beasiswa Pemuda Tangguh dan Peningkatan Anggaran. (Berita resmi/siaran pers pemerintah daerah).